



ABOUT THE JOURNAL

ANNOUNCEMENTS

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP) is open access, peer-reviewed, and scientific journal at international level published by The Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia. The objective of Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP) is to publish original research and review articles from researchers and practitioners on various topics of society, culture, and political issues: community welfare, social development, civil society movements, digital society and disruption, gender issues, family and marriages, media, information & literacy, tourism development, sociocultural anthropology, politics, governance & democracy, international politics & security studies, youth studies, radicalism and terrorism, public policy & innovation, citizenship & public management.

This journal is published quarterly and has been certified as a Scientific Journal, accredited since 1999, and accredited second grade (Sinta 2 or S2) since October 2018 by the Indonesian Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. Since 2017, all articles have been published in English. Submissions are open year-round. Before submitting, please ensure that the manuscript is in accordance with MKP's **focus and scope**, written in English, and follows our **author guidelines** & **manuscript template**.

The journal has been indexed in Emerging Sources Citation Index (ESCI-Web of Science), ASEAN Citation Index (ACI), Directory of Open Access Journal (DOAJ), Google Scholar, and other international indexing.





FOCUS AND SCOPE

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP) is open access, peer-reviewed, and scientific journal published by The Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia. The objective of Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP) is to publish original research and review articles from researchers and practitioners on various topics of society, culture, and political issues: community welfare, social development, civil society movements, digital society and disruption, gender issues, family and marriages, media, information & literacy, tourism development, sociocultural anthropology, politics, governance & democracy, international politics & security studies, youth studies, radicalism and terrorism, public policy & innovation, citizenship & public management.

Editorial Team



Siti Mas'udah

Editor in Chief

Department of Sociology, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57213150183



-



Siti Kusujarti

Editorial Boards

Department of Sociology and Anthropology, Warren Wilson College, United States



-

-

56276925900



-



Darwis Khudori

Editorial Boards

Institute of Oriental Languages and Civilizations, Université Le Havre Normandie, France



-

-

6508165014



-



Rustinsyah Rustinsyah

Editorial Boards

Department of Anthropology, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57203147146



-





Rahma Sugihartati

Editorial Boards

Department of Library and Information Science, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57204973509



-



Muhammad Saud

Editorial Boards

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga, Indonesia



-

-

57204564159



-



Evan Doran

Editorial Boards

Faculty of Arts and Social Sciences, The University of Sydney, Australia



-

-

6603714845



-



Violeta Schubert

Editorial Boards

Department of Development Studies, Faculty of Social and Political Sciences, The University of Melbourne, Australia



-

-

25634540300



-



Amy Jacobson

Editorial Board

Department of Anthropology, Rutgers The State University of New Jersey, United States



-

-

10143076300



-



Maciej Henneberg

Editorial Boards

Department of Anatomy and Pathology, University of Adelaide, Australia



-

-

7006985833



-



Sughmita Maslacha Amala Solicha

Assistant Editor

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia



-

XX27325X56

7003851740



-



Salsabila Damayanti

Assistant Editor

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, Indonesia



-

0000-0003-2388-6740

-



-

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah Sri Juni Woro Astuti.....	85–94
Media Pers Lokal Melawan Korupsi Dwiyanto Indiahono	95–101
Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Machya Astuti Dewi	102–111
Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2009 Wahidah Zein Br Siregar	112–118
Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....	119–129
Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM Priyono Tri Febrianto.....	130–138
<i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah	139–151
Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i> pada Masyarakat Tamping Moch. Jalal	152–161
Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective Amir Fatah	162–167

Social Early Warning System untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat

Karnaji¹, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

This paper assumes that the basic principle of social early warning system is how to proactively detect, monitor, analyses and manipulate the seed of conflict as early as possible. This paper is based on in depth interview to several prominent residences, religious leaders, head of districts, villages, and several related institution leaders in the East Java Province. This paper shows that there are four points to be considered in the social early warning system development program. First, to determine who could be the person to relate and to detect early possibility of social panic in the society. Second, to determine and offer the form and kinds of outlet for the society. Third, to register the result of monitoring. Fourth, to overcome possibilities at the lowest level at the local community. Fifth, to follow up the previous strategies that had been developed before. In many cases sometimes social panic in the society becomes wildly developed like a snow ball, that becomes bigger and bigger, so that it could not be easily overcome at the village or local community level.

Key words: local community, latent, instability, monitoring, harmony

Kendati Provinsi Jawa Timur diwarnai keaneragaman penduduk dan masyarakat yang multipluralis, namun entah karena apa, semua keragaman itu sepertinya dapat berjalan dengan serasi. Padahal, di berbagai wilayah yang lain tertentu, katakanlah seperti Sampit, Palangka Raya, Ambon, Maluku, dan berbagai daerah lain, telah terbukti bahwa hubungan antar anggota masyarakat yang berbeda etnis terjalin sangat rapuh. Alih-alih antar satu dan yang lain bersedia saling menyapa dengan tulus, bahkan yang terjadi adalah sebuah pertikaian dan konflik berdarah, yang membawa korban ratusan atau bahkan ribuan nyawa tewas sia-sia.

Berbagai kajian telah membuktikan bahwa sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan ideologi serta disekat oleh batas-batas kelas yang *rigid*, niscaya akan mengidap potensi konflik yang besar jika semua perbedaan dan kesenjangan yang ada tidak dikelola dengan baik (Susetiawan 2000, Sihbudi & Nurhasim 2001). Studi konflik telah dimulai sejak perkembangan ilmu sosial klasik sampai abad postmodern terutama melalui disipilin ilmu sosiologi, psikologi, dan hubungan internasional. Akan tetapi studi ini menjadi perhatian serius dan berkembang di Indonesia melalui berbagai peristiwa konflik kekerasan baik dalam dimensi etnis,

agama dan separatisme pasca kekuasaan Orba (Orde Baru) (Susan 2009:5). Beberapa studi mengenai konflik dalam masyarakat di Indonesia yang telah dilakukan antara lain oleh Afrizal (2007), Karnaji (2003), Siahaan (2002), dan Yuwinanto (2004), namun belum ada yang membahas mengenai *early warning*.

Kenapa di wilayah tertentu konflik antar etnis atau konflik horisontal nyaris tak pernah meletup secara berarti? Daya tahan apakah yang dimiliki sebuah daerah dan komunitas seperti di Provinsi Jawa Timur hingga daerah provinsi nomor dua terbesar di Indonesia ini relatif mampu tumbuh relatif serasi, dan bahkan seolah begitu kenyal terhadap berbagai provokasi politik dan sosial? Meski riak-riak kecil konflik tetap terjadi dan potensi konflik juga siap meletup setiap saat, tetapi dibandingkan sejumlah daerah lain kondisi sosial-politik Provinsi Jawa Timur boleh dikata relatif harmonis.

Beberapa waktu yang lalu, di sejumlah daerah di Indonesia terjadi bentrokan berdarah antara penduduk asli Dayak dan pendatang yang berasal dari etnis Madura, tidak hanya terjadi di Sampit tetapi telah merambah ke wilayah di sekitarnya. Ratusan jiwa melayang sia-sia —sebagian dalam kondisi sangat menggenaskan, kepalanya dipenggal dan kemudian diarak keliling kota di bawah tatapan ribuan mata

¹ Korespondensi: Karnaji, Dept. Sosiologi, FISIP, Unair, Jl. Airlangga 4-6, Surabaya 60286. Telp.: 031 5011744, E-mail: karnaji_fisipua@yahoo.com/karnaji_fisip@unair.ac.id

yang nanar memerah. Seperti mengulang kembali sejarah pertikaian antaretnis yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, Ambon, atau yang lain, bentrokan dan aksi berdarah yang terjadi di Sampit seolah menjadi episode ke sekian kalinya yang berpola sama.

Dua kelompok etnis yang telah lama bersitegang dan hidup dalam suasana yang penuh dengan syakwasangka, akhirnya kembali terlibat dalam aksi pembantaian etnis yang kejam dan brutal. Kasus kerusuhan Sampit, bukan hanya menimbulkan gelombang pengungsi dan bencana kemanusiaan yang menohok masa depan anak-anak, tetapi juga makin memanas bara api yang sudah bertahun-tahun mengendap. Berbeda dengan kasus amuk massa yang terjadi akibat dipicu kesenjangan ekonomi atau pertikaian politis yang sifatnya struktural, konflik terbuka yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak atau melayu sesungguhnya adalah konflik kultural yang dipicu oleh perseteruan (*feud*) yang harus dilacak jauh ke belakang —yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Studi ini bukan saja bermaksud mengkaji problema yang muncul di seputar keserasian sosial yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, tetapi sekaligus juga bermaksud merumuskan kebijakan dan menyusun program-program untuk mengembangkan keserasian sosial dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya. Bagi wilayah dan masyarakat Indonesia, keserasian sosial dibutuhkan selain untuk menghindari terjadinya berbagai friksi dan konflik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan, tetapi juga penting untuk terus dikembangkan sebagai modal sosial untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang mana hal itu merupakan salah satu prasyarat dan daya tarik bagi investasi pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat.

Metode Penelitian

Kegiatan ini pada dasarnya bertujuan untuk memetakan kondisi keserasian sosial, dan sekaligus menyusun model *social early warning system* untuk mencegah terjadinya konflik yang eksplosif dan sekaligus meningkatkan keserasian sosial dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan di Provinsi Jawa Timur.

Lokasi studi ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu Provinsi yang menjadi barometer bagi dinamika kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di Indonesia, studi ini

memiliki arti penting sebagai peta awal sekaligus acuan untuk menyusun kebijakan dan program pengembangan keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Agar bisa diperoleh hasil yang benar-benar maksimal, secara rinci, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah:

Pertama, melakukan *review* terhadap berbagai kajian dan penelitian tentang keserasian sosial, pergesekan dan konflik, khususnya yang terjadi di Indonesia dan Provinsi Jawa Timur pada khususnya. *Review* ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor teoretik yang memengaruhi dinamika sosial dan kondisi keserasian sosial di masyarakat.

Kedua, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang kondisi keserasian sosial di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Dalam penelitian ini, data sekunder tentang keserasian sosial ini telah dicoba dilacak melalui media massa, khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, dalam kegiatan ini, pengumpulan data sekunder juga dilakukan dengan cara melacak data dari Bakesbanglinmas, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil pelacakan di media massa, studi ini telah berhasil mengidentifikasi beberapa problema dan bentuk konflik yang sempat mencuat di media massa, yaitu konflik antara kekuatan komersial dan penduduk lokal yang terjadi di Bojonegoro berkaitan dengan kegiatan industrialisasi migas, konflik ideologis antar pendukung partai politik yang sempat terjadi di Kabupaten Tuban, dan konflik politik yang terjadi Kabupaten Sampang. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah ini, sempat menjadi itu yang berkepanjangan dan menyita perhatian media massa. Oleh sebab itu, dalam studi ini konflik-konflik tersebut akan dianalisis tersendiri dan menjadi bagian dari data yang memperkaya temuan data dari hasil pelacakan langsung ke lapangan.

Ketiga, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari sejumlah informan yang ditemui di berbagai kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk memperoleh gambaran tentang potensi pranata lokal yang memiliki peran dalam menciptakan dan menjaga keserasian sosial, studi ini secara *purposive* telah menetapkan 4 kabupaten/kota sebagai lokasi penelitian, yaitu: Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Malang. Wawancara dipandu *interview guide* yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Data yang digali, lebih banyak berupa data kualitatif yang mendalam

untuk memetakan situasi problematik yang timbul dan akar historis dari berbagai persoalan keserasian sosial yang timbul di masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Wawancara mendalam dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, serta berbagai pihak yang terkait. Di masing-masing kota/kabupaten, jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 15 informan. Wawancara mendalam ini penting dilakukan untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi akar masalah dari berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat di sekitar mereka.

Seluruh data yang dikumpulkan, setelah dilakukan pemilahan menurut aspek yang telah dirinci, telah dicoba dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkan dengan kajian lain yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Sepanjang memungkinkan, data telah dicoba ditampilkan dalam bentuk matriks untuk mempermudah pembaca memahami masalah yang dipaparkan.

Hasil Penelitian

Sumber Konflik

Secara horisontal, masyarakat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat serta perbedaan kedaerahan (Nasikun 1984:30). Seperti di Provinsi Jawa Timur juga diwarnai keanekaragaman penduduk dan masyarakat yang multipluralis, namun entah karena apa, semua keragaman itu sepertinya dapat berjalan dengan serasi. Padahal, di berbagai wilayah yang lain tertentu, katakanlah seperti Sampit, Palangkaraya, Ambon, Maluku, dan berbagai daerah lain, telah terbukti bahwa hubungan antaranggota masyarakat yang berbeda etnis terjalin sangat rapuh. Alih-alih antarsatu dan yang lain bersedia saling menyapa dengan tulus, bahkan yang terjadi adalah sebuah pertikaian dan konflik berdarah, yang membawa korban ratusan atau bahkan ribuan nyawa tewas sia-sia.

Kenapa di wilayah tertentu konflik antaretnis atau konflik horisontal nyaris tak pernah meletup secara berarti? Daya tahan apakah yang dimiliki sebuah daerah dan komunitas seperti di Provinsi Jawa Timur hingga daerah provinsi nomor dua terbesar di Indonesia ini relatif mampu tumbuh relatif serasi, dan bahkan seolah begitu kenyal terhadap berbagai provokasi politik dan sosial? Meski riak-riak kecil

konflik tetap terjadi dan potensi konflik juga siap meletup setiap saat, tetapi dibandingkan sejumlah daerah lain kondisi sosial-politik Provinsi Jawa Timur boleh dikata relatif harmonis.

Beberapa waktu yang lalu, di sejumlah daerah di Indonesia, kita tentu sudah mengetahui bagaimana bentrokan berdarah antara penduduk asli Dayak dan pendatang yang berasal dari etnis Madura terus bergulir: tidak hanya terjadi di Sampit, tetapi telah merambah ke wilayah di sekitarnya. Ratusan jiwa melayang sia-sia —sebagian dalam kondisi sangat menggenaskan, kepalanya dipenggal dan kemudian diarak keliling kota di bawah tatapan ribuan mata yang nanar memerah. Seperti mengulang kembali sejarah pertikaian antaretnis yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, Ambon, atau yang lain, bentrokan dan aksi berdarah yang terjadi di Sampit seolah menjadi episode ke sekian kalinya yang berpola sama.

Dua kelompok etnis yang telah lama bersitegang dan hidup dalam suasana yang penuh dengan syakwasangka, akhirnya kembali terlibat dalam aksi pembantaian etnis yang kejam dan brutal. Kasus kerusuhan Sampit, bukan hanya menimbulkan gelombang pengungsi dan bencana kemanusiaan yang menohok masa depan anak-anak, tetapi juga makin memanasakan bara api yang sudah bertahun-tahun mengendap. Berbeda dengan kasus amuk massa yang terjadi akibat dipicu kesenjangan ekonomi atau pertikaian politis yang sifatnya struktural, konflik terbuka yang terjadi antara etnis Madura dengan etnis Dayak atau melayu sesungguhnya adalah konflik kultural yang dipicu oleh perseteruan (*feud*) yang harus dilacak jauh ke belakang —yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam aksi amuk massa yang dipicu oleh faktor kesenjangan sosial-ekonomi, pertikaian niscaya akan segera mengendur apabila sumber-sumber produksi yang ada telah terbagikan secara adil atau pada saat telah terbangun hubungan sosial yang bersifat simbiosis mutualisme, yakni pola hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomis, tanpa harus didahului dengan proses akulturasi budaya. Tetapi, lain soal jika konflik yang timbul berakar dari adanya dendam kesumat dan perseteruan lama sebagaimana layaknya bara api.

Banyak studi membuktikan bahwa perseteruan nyaris tidak pernah dapat terselesaikan secara tuntas, sekali pun mungkin antaretnis yang berbeda itu sebagian di antaranya telah terjadi asimilasi dan hubungan personal yang akrab. Seperti dituturkan oleh sebagian pengungsi dari Sampit, bahwa sebagian

di antara etnis Madura sebenarnya tak sedikit yang telah menikah dengan penduduk lokal atau paling tidak telah bertahun-tahun hidup bertetangga dan menjalin kontak-kontak personal. Tetapi, ketika kerusuhan meledak, korban dan sasaran aksi amuk massa biasanya tidak pernah pandang bulu.

Secara teoretis, pada tingkat individu, konflik antaretnis memang terkadang dapat dieliminasi dengan adanya proses interaksi sosial yang intens dan mekanisme *cross cutting affiliation*. Tetapi, pada tingkat kelompok niscaya yang namanya syakwasangka dan dendam akan tetap membara. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin seseorang bisa melupakan dendam dan kebencian yang telah berakar di benaknya jika dulu-dulunya orang tua atau sanak keluarga pernah terbunuh oleh kelompok etnis lain? Seorang anak yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan ayah-ibunya atau kakak-kakak dibantai dengan kejam, niscaya pengalaman itu akan terus mengendap menjadi bayangan hitam yang melahirkan mimpi-mimpi buruk setiap waktu.

Perseteruan pada dasarnya adalah dampak dari terjadinya suatu kematian yang membangkitkan perasaan sakit hati dan dendam berdarah dari suatu kelompok terhadap kelompok lain (Kuper & Kuper 2000: 358). Perseteruan tidak akan pernah hilang dengan tuntas, karena yang namanya dendam di mana pun tentunya sulit dihapuskan begitu saja. Perseteruan, umumnya hanya dapat diredam (sementara waktu) melalui aksi kekerasan, dan pertumpahan darah biasanya dipercaya sebagai bentuk penyelesaian yang paling rasional, sedangkan bentuk penyelesaian yang lain ibaratnya hanyalah semacam gencatan senjata. Dengan kata lain, jika dalam kurun waktu tertentu konflik antaretnis belum meledak, maka itu semua hanyalah jeda sosial yang fungsinya sekadar menunda konflik terbuka yang sesungguhnya.

Di masa lalu, konflik antaretnis relatif jarang meletup keluar karena memang regulasi yang dilakukan negara mampu menetralsir konflik yang membara di tingkat bawah. Tetapi, sejak reformasi bergulir liar dan peran pihak ketiga tidak lagi dominan seperti di masa lalu, ditambah dengan terjadinya eskalasi kekerasan di berbagai wilayah, maka perseteruan antaretnis dan luka lama yang telah puluhan tahun mengendap pun kembali terkoyak.

Perseteruan antara dua etnis yang sama-sama menyimpan dendam, seolah seperti luka yang kembali disiram cuka. Kasus satu-dua warga Madura yang bersenggolan di pasar dengan etnis Dayak atau Melayu kemudian saling tinju, perkelahian antara

sopir yang berasal dari pendatang dengan penduduk lokal, dan semacamnya pada dasarnya hanyalah berfungsi sebagai faktor pemercepat (*precipitating factors*). Aksi amuk massa yang dilakukan etnis Dayak, dengan demikian bukan muncul akibat godaan psikologis dari suasana kerumunan atau gerakan massa yang spontan, melainkan ekspresi dari rasa geram yang terpendam selama bertahun-tahun, dan kemudian meledak menjadi aksi pembantaian massal.

Dalam situasi normal, tentu sulit dibayangkan ada orang dengan wajar bersinar-sinar dan sorak-sorai yang gempita menenteng kepala orang yang masih berlumuran darah. Tetapi, ketika emosi dan insting purbawi manusia telah naik ke ubun-ubun, maka membunuh sesama kemudian tak ubahnya seperti ritus yang dipercaya menjadi saluran bagi mengalirnya tekanan psikologis dan dendam kesumat yang mengendap di benak mereka. Bagi seseorang yang telah ditelikung oleh dendam, membunuh musuh pada akhirnya justru dianggap menjadi bagian dari mekanisme *survival* mereka —yang dinilai benar dan perlu terus dikembangkan sebagai sarana untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan kehidupan diri dan keluarganya.

Apakah dua kelompok masyarakat yang berbeda budaya dan etnis tidak mungkin dapat dipersatukan dan hidup secara berdampingan? Meski di sebagian komunitas, perseteruan antaretnis riskan terjerumus dalam konflik yang berdarah, tetapi ternyata di beberapa komunitas yang lain perbedaan yang ada tidak selalu harus berbuntut dengan konflik yang terbuka. Sekadar contoh: lihat saja bagaimana interaksi sosial antarkelompok masyarakat yang berlangsung di kawasan Utara Kota Surabaya. Meskipun di sana kita tahu berbagai kelompok etnis hidup dan mencari nafkah bersama dengan caranya masing-masing. Penduduk kota yang berasal dari etnis Cina, Madura, Arab, Jawa, dan lain-lain, secara fisik bermukim di perkampungan yang berbeda dan secara kultural memiliki adat istiadat yang berbeda secara diametral. Tetapi, karena satu dengan yang lain diikat oleh kepentingan yang sama dan pola hubungan sosial yang sifatnya fungsional, maka perbedaan kemudian terbukti dapat diredam.

Leo Agustino (2004) menjelaskan dengan rinci tentang pola terjadinya konflik primordial. Pertama, konflik primordial yang terkait hubungan darah, yaitu suatu komunitas yang diikat oleh hubungan biologis/darah (kekeluargaan dan/atau kekerabatan) di mana setiap individu di dalamnya mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu keluarga besar perikatan

semacam ini lebih mudah ditemui di masyarakat Afrika dan Asia. Berbagai konflik lokal di kawasan tersebut sering kali dipicu oleh hubungan darah.

Kedua, konflik primordial yang dihubungkan dengan persoalan ras, suatu komunitas yang dipersatukan oleh kesamaan etno-biologis yang ditampilkan dalam ciri-ciri fisik yang sama, seperti warna kulit, jenis rambut, bentuk wajah, dan lain-lain. Berdiasporanya kelompok ras tertentu –Cina di Indonesia dan Malaysia, India dan Yahudi di Inggris, serta Afrika di Amerika Serikat –(yang) menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas di negara-negara tertentu sering kali memicu berbagai konflik rasial.

Ketiga, konflik primordial yang terkait dengan hubungan agama: persoalan agama merupakan sumber konflik yang cukup krusial di berbagai kawasan dunia. Partisi antara India-Pakistan pada dekade 1950-an merupakan contoh paling jelas dari konflik agama terjadi di berbagai kawasan di Asia, seperti India (Hindu vs. Muslim atau Hindu vs. Shikh), Filipina (pemerintah vs. separatis Moro), dan Indonesia (Kristen vs. Muslim).

Keempat, konflik primordial yang dihubungkan dengan wilayah. Ikatan yang didasarkan atas kesamaan wilayah sering kali merupakan salah satu sumber konflik-baik dalam masyarakat pluralis maupun dalam masyarakat yang homogen. Fanatisme kedaerahan yang dimiliki kelompok tertentu biasanya berkembang menjadi semangat kedaerahan (nasionalisme lokal) yang sempit dengan diwarnai oleh setereotype terhadap para pendatang dari daerah lain dalam masyarakat pluralis seperti Indonesia dan India, misalnya, semangat kedaerahan sering kali memicu konflik regional (*intra state conflict*).

Kelima, konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan adat-istiadat. Suatu komunitas dapat juga diikat berdasarkan persamaan kebiasaan dan norma-norma yang dianut. Di dalam prakeik kehidupan sehari-hari konflik adat-istiadat sering kali terjadi menyertai konflik etnis dan wilayah-wilayah karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya biasanya mempersoalkan perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan adat/budaya. Dalam suatu masyarakat yang terdiri dari mayoritas dan minoritas, kaum mayoritas biasanya mendominasi norma dan nilai yang berlaku sehingga membuat "kebiasaan" kaum minoritas menjadi tersubordinasi. Walaupun kita jarang menemukan peperangan yang dipicu hanya oleh persoalan adat-istiadat tetapi faktor ikatan adat-istiadat dapat membuat suatu konflik menjadi dahsyat dan lebih rumit.

Keenam, konflik primordial yang dihubungkan dengan ikatan bahasa walaupun bahasa sering kali berfungsi sebagai sumber pengikat persatuan suatu komunitas tetapi bahasa dapat juga berperan sebagai sumber konflik seperti yang terjadi di Afrika dan Asia Selatan (India, Pakistan, dan Sri Lanka). Pemaksaan kelompok etnis tertentu sebagai bahasa nasional biasanya menimbulkan ketidakpuasan dari kelompok etnis lain yang tidak jarang berkembang menjadi konflik kekerasan.

Pola Terjadinya Konflik

Di Provinsi Jawa Timur, sumber terjadinya konflik dapat berdimensi ekonomi, politik, budaya, dan ideologi. Konflik-konflik yang berdimensi ekonomi dan politik acap kali berhubungan dengan aspek-aspek instrumental dan material, yaitu yang berkaitan dengan siapa mendapat apa atau siapa kehilangan apa dan berapa banyak kehilangan tersebut. Konflik berdimensi ekonomi ini cenderung bersifat riil. Sebaliknya konflik-konflik berdimensi budaya dan ideologi memiliki aspek yang lebih fundamental dan karena itu sering kali cenderung bersifat abstrak. Pada prinsipnya, bagaimana bentuk-bentuk aksi yang dipakai pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sangat tergantung pada bagaimana mereka melihat sumber-sumber konflik, tujuan-tujuan konflik, serta cara-cara penyelesaian konflik.

Apapun jenis konflik yang terjadi di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur, umumnya dua elemen utama yang sering kali berkombinasi menjadi sumber hakiki konflik. Pertama, elemen identitas atau *potent identity-based factors*. Kelompok-kelompok sosial dimobilisasi dengan membawa identitas komunal kelompok atas dasar ras, agama, ideologi, dan kepentingan kelompok. Kedua, elemen persepsi terhadap persoalan distribusi sumber-sumber ekonomi, politik dan sosial di dalam masyarakat. Ketika elemen *potent identity-based factors* dan elemen persepsi mengenai adanya ketidakadilan ekonomi-sosial ini bercampur, maka potensi konflik menjadi semakin sangat tinggi dan lalu memunculkan konflik yang bersifat mengakar (*deep-rooted conflict*). Secara garis besar, jenis dan pola terjadinya konflik yang mengancam keserasian sosial masyarakat Jawa Timur adalah:

Pertama, konflik horizontal yang terjadi karena sekelompok warga masyarakat tertentu dengan warga masyarakat yang lain terlibat dalam perebutan sumber-sumber produksi yang jumlahnya relatif terbatas. Di Provinsi Jawa Timur, salah satu contoh

konflik horizontal antarwarga masyarakat yang memperebutkan sumber-sumber produksi adalah konflik yang terjadi antara nelayan dari daerah yang berbeda, dan antara nelayan modern dan nelayan tradisional yang acap kali dirugikan karena perkembangan alat tangkap ikan yang canggih, seperti kapal *Trawl*.

Di berbagai media massa, berkali-kali kita bisa melihat terjadinya kasus bentrokan antarnelayan, seperti betrokan yang berkali-kali terjadi antara nelayan Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan melawan nelayan dari Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Kenapa konflik antarnelayan ini terus terjadi sebetulnya bukan semata-mata dipicu perebutan wilayah tangkap ikan antardaerah. Tetapi, yang menjadi akar masalah sesungguhnya adalah kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan yang berkecamuk di kepala kelompok nelayan tradisional (Surya, 30 Oktober 2004). Di Situbondo, misalnya, seperti dilaporkan di berbagai media massa bahwa sempat terjadi sejumlah nelayan kecil setempat sering kali resah karena ada nelayan yang diketahui menggunakan lampu merkuri untuk menangkap ikan. Dengan menggunakan daya tarik cahaya lampu merkuri, dikhawatirkan justru ikan-ikan kecil yang akan naik dan terjaring terlebih dahulu, sehingga cepat atau lambat sumber daya laut akan turun drastis karena tidak ada lagi pembaharuan.

Di Jawa Timur, konflik yang terjadi antarnelayan ini biasanya terjadi karena ada sekelompok nelayan yang dianggap melanggar kesepakatan, mencari ikan di wilayah tangkapan nelayan daerah lain dengan menggunakan pukot harimau minim dan bom ikan (*bondet*). Bagi nelayan tradisional yang sehari-hari ruang gerak hanya sekitar 3–5 mil laut karena keterbatasan peralatan tangkap yang dimiliki, tentu bisa dipahami jika mereka resah karena harus menghadapi ancaman *overfishing* dan pengurasan sumber penghasilan mereka oleh nelayan modern yang memiliki modal dan teknologi lebih canggih. Sebagai bagian dari masyarakat pesisir yang tergolong paling miskin, tidak berdaya, dan menjadi korban pertama yang paling menderita dari kebijakan modernisasi perikanan (*blue revolution*), sesungguhnya wajar jika para nelayan tradisional kembali meradang tatkala batas toleransi mereka terus-menerus dilanggar.

Berbeda dengan nelayan modern yang acap kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi *over fishing*, nelayan tradisional sering kali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan

modernisasi perikanan yang sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*), sehingga mereka niscaya akan menjadi korban yang pertama dan yang paling menderita jika sumber daya ikan di wilayah pantai makin langka.

Kedua, konflik horizontal atau konflik identitas yang berlatarbelakang isu SARA. Di Provinsi Jawa Timur boleh dikata pola konflik inilah yang paling potensial meledak dan paling mencemaskan. Isu Kristenisasi, pelarangan pembangunan gereja di sejumlah wilayah, syakwasangka antarkelompok pemeluk agama yang berbeda, isu pri versus non-pri, dan sejenisnya adalah hal-hal yang acap kali masih muncul di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir.

Karakteristik dari konflik-konflik horizontal yang berdimensi identitas ini adalah sifatnya yang persisten, dan acap kali tumpang-tindih dengan isu-isu kesenjangan ekonomi. Konflik-konflik yang berbasis SARA ini sering kali bercampur dengan konflik mengenai distribusi sumber-sumber; wilayah, ekonomi, dan prospek lapangan kerja. Dalam konflik (*latent*) antar etnis yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, salah satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan adalah soal persepsi, sebab persepsi sering kali menentukan apakah hubungan antar-kelompok cenderung mengarah pada terjadinya tindak kekerasan atau tidak. Di Provinsi Jawa Timur, ada kecenderungan posisi kelompok etnis Tionghoa acap kali dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup, kultur, sosial dan kepentingan vital lain, sehingga pada tingkat kelompok kompromi tampaknya menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai. Konflik antaretnis yang terpendam ini biasanya menjadi makin sulit dihapuskan ketika dimeni konflik yang ada ditambahi dengan perbedaan-perbedaan lain yang makin memperkeras jarak, seperti perbedaan agama, permukiman dan segregasi sosial yang lain.

Ketiga, konflik horizontal antarkelompok yang berbeda ideologi politik. Di Provinsi Jawa Timur menjelang Pemilu, dan menjelang serta pasca pelaksanaan Pilkada di berbagai kota/kabupaten, potensi pergesekan antarmassa yang berbeda afiliasi partai politik dan ideologi ini biasanya cenderung makin besar karena masing-masing kelompok bersikukuh memperjuangkan dan membela calon yang diusung. Di Provinsi Jawa Timur sendiri, sepanjang tahun 2005, misalnya kita tahu yang namanya Pilkada telah dan bakal digelar di 16 kota/kabupaten, sehingga rawan dan dibayangi

kemungkinan terjadinya konflik (Surya, 13 April 2005). Prediksi dan kekhawatiran ini dilontarkan bukan tanpa alasan. Kendati saat ini konflik yang mencuat lebih banyak terjadi di lingkup intern partai dan bersifat elitis. Tetapi, tidak mustahil konflik yang terjadi di tingkat elit itu meluas dan melibatkan massa pendukung masing-masing pihak.

Meski di atas kertas, pelaksanaan Pilkada memang menjanjikan perubahan ke arah kehidupan berdemokrasi yang lebih baik. Namun, harus diakui bahwa pelaksanaan Pilkada yang dilakukan dengan cara agak *instant* dan berbarengan seperti sekarang ini sesungguhnya riskan terjerumus ke dalam situasi yang kontra-produktif. Pada batas-batas tertentu, bahkan pelaksanaan Pilkada terbukti juga berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal yang makin terbuka, baik atas dasar perbedaan ideologi, kepentingan atau identitas sosial-politik yang lain.

Dalam merumuskan visi dan program yang ditawarkan kepada publik, atau ketika seorang kandidat Pilkada mencoba menjangir simpati massa, tidak jarang terjadi retorika yang dikembangkan justru membuat sekat-sekat sosial antar golongan satu dengan yang lain menjadi makin jelas. Iklim persaingan antarkandidat, dan fragmentasi kekuasaan yang terjadi selama proses Pilkada, jangan heran jika kemudian dibarengi dengan kemungkinan tumbuhnya fragmentasi konflik pada tingkat komunitas yang lebih kecil. Kendati secara umum pelaksanaan Pilkada di kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur tergolong sukses, tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa pergesekan sempat muncul dan berlarut-larut, seperti kasus yang terjadi di Banyuwangi dan Sampang.

Keempat, konflik antara kekuatan massa versus kekuatan kelembagaan atau negara. Di Provinsi Jawa Timur, jenis konflik semacam ini terutama sering terjadi pada kasus pertanahan, khususnya di sektor perkebunan. Di era otonomi daerah, berbagai sengketa pertanahan yang terjadi di sektor perkebunan di sejumlah daerah Jawa Timur bukannya segera terselesaikan, tetapi acap kali justru makin marak. Sejak proses komersialisasi dan modernisasi merambah wilayah pedesaan, masalah pertanahan telah menjadi isu sosial-politik yang acap kali melahirkan berbagai sengketa: gerakan perlawanan, pembangkangan, dan bahkan hingga tetesan darah serta nyawa.

Di sektor perkebunan, konflik pertanahan dalam banyak kasus dipicu oleh proses pengalihan dan penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) yang sama sekali tidak berpihak kepada petani. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur, perusahaan-

perusahaan perkebunan negara dalam melaksanakan ekspansi usahanya sering kemudian mengambil alih tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Dalam sepuluh tahun belakangan ini, investasi modal di sektor perkebunan kita tahu telah makin meluas, sehingga konsekuensinya sektor perkebunan komersial ini membutuhkan tanah sebagai modal utamanya. Fakta yang ada menunjukkan tanah-tanah di Jawa —kecuali lahan hutan— hampir tidak ada lahan kosong yang terlantar.

Tanah-tanah perkebunan eks perkebunan Belanda (eks hak *erpach*) maupun tanah-tanah TN (Tanah Negara) yang semula telah digarap petani kecil secara turun-temurun, baik secara sukarela maupun terpaksa kemudian diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan. Negara yang diharapkan petani mau mendengar keluhan dan berpihak kepada mereka, ternyata sering kali malah mendukung perkembangan atau ekspansi perkebunan komersial dan bahkan tak segan menceraibut petani dari hubungannya dengan tanah.

Sengketa atau permasalahan pertanahan — termasuk di areal perkebunan— pada dasarnya bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum terhadap kebijakan agraria, tetapi juga memuat dan menyangkut persoalan sosial, ekonomi dan politik. Berbagai kasus sengketa tanah tidak semata muncul karena ketidakjelasan administratif atau proses sertifikasi yang tidak beres, melainkan juga dipicu karena orientasi kebijakan pembangunan yang cenderung pro kepada teori-teori modernisasi. Di Indonesia, banyak ahli telah mengkaji bahwa sejak Orde Baru, kebijakan pertanahan lebih dititikberatkan kepada upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat —yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan dan pembangunan sektoral di bidang pertanian dan industri (Kasim & Suhendar dalam Kusuma & Agustina 2003).

Selama pemerintahan Orde Baru hingga era reformasi telah banyak terbukti bahwa penetrasi modal ke daerah pedesaan dan pinggiran kota, bukan cuma menyebabkan terjadinya proses infiltrasi, invasi, dan suksesi pemilikan lahan, tetapi juga pemusatan penguasaan tanah yang berlangsung melalui dua mekanisme utama: pasar dan intervensi negara (Fauzi 1997). Kenaikan harga tanah dalam banyak hal dipicu oleh ulah spekulasi dan perubahan peruntukan tanah untuk kegiatan industri atau pembangunan sektor pertanian komersial. Tanah adat, dan lahan tradisional yang semula generasi ke generasi menjadi lahan garapan masyarakat petani, acap kemudian dieksploitasi untuk kepentingan komersial: petani dipaksa menanam komoditi yang

sebetulnya tidak terlalu mereka kenal atau bahkan secara ekonomi rugi, dan tidak sedikit lahan "milik" petani diambil begitu saja dengan dalih untuk mendukung swasembada pangan atau kepentingan negara, seperti pembangunan waduk atau budidaya sektor perkebunan komersial demi ekspor.

Ketika rakyat dan petani masih terkungkung dengan ketidakberdayaannya, berbagai tindakan pengambilalihan dan pemaksaan agar petani menanam komoditi perkebunan tertentu, mungkin tidak menjadi persoalan serius yang meresahkan. Tetapi, lain soal ketika reformasi bergulir cepat, dan sikap kritis masyarakat tidak lagi dapat dihegemoni oleh kekuatan komersial atau tindakan represi kekuasaan. Dalam lima tahun terakhir, radikalisme di kalangan petani benar-benar membara. Gerakan perlawanan petani muncul di mana-mana, dengan eskalasi yang kian lama kian radikal, sehingga jika tidak segera dicari jalan keluar yang baik atas permasalahan ini, maka dikhawatirkan imbasnya akan berdampak kontra-produktif bagi pihak mana pun.

Akses terhadap tanah-tanah strategis yang semula cenderung didominasi oleh kalangan terbatas, untuk industri, perumahan dan pertumbuhan ekonomi. Kini, tidak lagi berjalan mulus. Di kota besar seperti Surabaya, berbagai kasus penggusuran dan ganti-rugi di masa lalu yang dinilai tidak memuaskan, kini menuai perlawanan. Demikian pula kasus pertanahan di areal perkebunan komersial. Di masa lalu, perusahaan perkebunan komersial yang didukung aparat keamanan dan tindakan represif mungkin berhasil untuk sementara meredam perlawanan rakyat. Tetapi, saat ini berbagai aksi unjuk rasa dan gerakan perlawanan seolah tumbuh bagai jamur di musim hujan. Di Malang, Pasuruan, Jember, Situbondo, dan Blitar, konflik pertanahan di sektor perkebunan terjadi berkali-kali dan hingga saat ini pun belum berhasil dirumuskan formula atau tata cara penyelesaian sengketa yang benar-benar dapat memuaskan semua pihak.

Di Kabupaten Malang, misalnya, permasalahan pertanahan di areal perkebunan terjadi belasan kasus: bukan hanya petani berhadapan dengan perkebunan negara dan swasta, tetapi juga berhadapan dengan aparat keamanan, yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Kalau dilihat sejarahnya, konflik tanah di daerah Malang ini sebetulnya merupakan persoalan yang telah lama ada. Namun baru muncul ke permukaan dengan perlawanan yang terbuka sejak 25 Desember 1997. Perlawanan warga Desa Simojayan yang diwujudkan dengan

membabati tanaman kakao, kopi, cengkeh dan sengon diawali di Afdeling Petungombo di Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading. Di desa ini, lahan yang dibabat warga desa mencapai 240 hektar. Aksi perlawanan Desa Simojayan ini mengilhami desa-desa lainnya yang sebelumnya telah memiliki persengketaan dengan pihak perkebunan. Aksi warga ini seakan mendapatkan tenaga baru ketika era reformasi merebak. Aksi reformasi yang terus bergulir seakan menjadi justifikasi bahwa apa yang dilakukan warga desa dengan melakukan pembabatan dalam upaya memperoleh hak-hak garap tanah yang telah lepas dapat dibenarkan, dan bahkan strategis untuk dikembangkan di wilayah lain.

Di Jember, konflik pertanahan di sektor perkebunan terjadi antara penduduk lokal dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP). Pada 1999, konflik sempat memuncak dan ditandai dengan aksi penjarahan kopi secara massal di Kebun Ketajeg, Desa Suci, dan Desa Kemiri, Kecamatan Panti. Waktu itu, sedikitnya sepuluh orang ditembak dan sekitar 79 orang ditahan untuk dimintai keterangan. Selain menjarah, penduduk dilaporkan juga melakukan aksi pendudukan kantor dan rumah dinas sinder, serta para mandor PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) Jember. Alasan pendudukan itu karena mereka merasa ikut memiliki lahan kebun yang saat ini dimiliki PDP Jember (Surabaya Post, 22 April 1999). Memasuki tahun 2001, aksi perlawanan rakyat kepada PDP tersebut belum juga menemukan titik temu. Kendati, menurut Direktur PDP Soewarno warga Ketajek telah menerima ganti rugi atau tali asih dari PDP Jember sebesar Rp 1 milyar atau sekitar Rp 800.000 s.d. Rp 3 juta per KK, tetapi sebagian masyarakat mengaku tidak pernah menerima ganti rugi atau tali asih (Kompas, 11 April 2001).

Terlepas dari bentuk perlawanan yang dilakukan, tindakan petani berunjuk rasa atau merusak tanaman di lahan sengketa, sesungguhnya merupakan bentuk ekspresi dari ketidakpuasan dan rasa diperlakukan tidak adil oleh berbagai kebijakan yang berpola *top-down*. Penerapan UUPA yang dinilai bias dan hanya membela kepentingan pemilik modal dan negara, dipersepsi rakyat atau petani pada khususnya bukan hanya membuat terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur penguasaan, pemilikan dan penyewaan tanah, tetapi juga perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dan status sosial.

Bisa dibayangkan, bagaimana reaksi seorang petani yang selama bertahun-tahun dipaksa mengerjakan lahan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi sekadar melayani kepentingan

perusahaan perkebunan komersial yang sama sekali tidak memerankan diri sebagai *patron*? Bagi petani yang merasa telah menggarap lahan selama puluhan tahun, dan turun-temurun, arti tanah dalam konstruksi sosial mereka tentu bukan sekadar aset produksi yang memiliki nilai ekonomi saja, tetapi di sana juga ada faktor keterikatan kultural, dan bagian inheren dari mekanisme *survival* mereka menghadapi tekanan kemiskinan dan situasi krisis.

Kelima, konflik antarkelas yang terjadi antara buruh dan pemilik modal atau kekuatan komersial. Di kota/kabupaten yang memiliki banyak pabrik atau kegiatan industri, khususnya Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Kediri, dan Malang, tidak sekali-dua kali terjadi kasus unjuk rasa atau demonstrasi kaum buruh yang dipicu soal UMR, THR, cuti dan berbagai kasus pelanggaran hak buruh yang lain. Pada saat hendak memasuki hari raya, ada kecenderungan keresahan dan kasus unjuk rasa buruh ini makin meningkat, dan bahkan dengan skala yang melibatkan ribuan atau puluhan ribu orang.

Di era reformasi, ada kecenderungan kesadaran dan sikap kritis kaum buruh umumnya meningkat tajam. Di mata kaum buruh, salah satu isu utama yang mereka biasa persoalkan dari waktu ke waktu umumnya adalah menyangkut kelayakan upah. Di penghujung 2005 misalnya, ketika kalangan pengusaha tengah sibuk menghitung ulang biaya produksi yang harus mereka keluarkan menyikapi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, persoalan baru yang belakangan ini memaksa kalangan pengusaha bereaksi adalah usulan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Bagi kalangan pekerja dan serikat buruh, ketentuan upah minimum yang saat ini berkisar antara Rp 500-600 ribu per bulan dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat "efek domino" kenaikan harga barang pasca kenaikan BBM.

Apakah tuntutan kaum buruh soal upah ini akan makin mengeras ataukah tidak, tentu sangat tergantung pada sikap dan respons yang diperlihatkan pemilik perusahaan. Tetapi, bagi kalangan buruh atau pekerja, akar masalah yang menjadi tuntutan utama mereka sebenarnya tidak hanya kenaikan upah, tetapi yang lebih substansial adalah sejauh mana pihak perusahaan mau bersikap empati dan memahami pekerja sebagai bagian dari aset perusahaan yang harus dilindungi –dan bukan dianggap sebagai beban biaya produksi yang sewaktu-waktu dengan mudah dikorbankan atau di-PHK jika perusahaan sedang dirundung masalah.

Membangun Kehidupan Multikulturalisme: Kearifan Lokal

Pada batas-batas tertentu, studi ini memang menemukan bahwa masyarakat Jawa Timur yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan ideologi serta disekat oleh batas-batas kelas yang *rigid*, niscaya akan mengidap potensi konflik yang besar jika semua perbedaan dan kesenjangan yang ada tidak dikelola dengan baik. Bukti-bukti yang ada di lapangan telah membuktikan bahwa masyarakat Jawa Timur yang tersratifikasi dan pluralistik acap kali dihadapkan pada sejumlah dilema: membiarkan perbedaan itu mencuat atau menekan perbedaan yang ada, dengan cara mencoba menutup-nutupinya dengan berbagai bentuk rekayasa sosial yang seolah-olah harmoni adalah satu-satunya kunci untuk membangun masa depan. Apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengelola perbedaan agar tidak tergelincir menjadi pemicu terjadinya disintegrasi dan konflik yang terbuka?

Di berbagai lokasi penelitian, studi ini menemukan bahwa di balik potensi konflik dan syakwasangka yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi perbedaan, ternyata masih ada pranata dan kearifan lokal yang terbukti fungsional dan efektif meredam agar perbedaan dan potensi konflik yang ada tetap dalam dikelola dengan baik, tanpa harus meletup menjadi konflik yang terbuka. Di sebagian warga masyarakat, mungkin benar bahwa perbedaan atas dasar agama atau etnis dapat membuat kedua belah pihak yang berbeda itu terus-menerus bersyakwasangka dan bahkan menyimpan kecurigaan yang kronis. Tetapi, di sebagian warga masyarakat yang lain, perbedaan yang ada itu, ternyata sering kali disikapi dengan bijak, penuh rasa toleransi dan terbukti mereka dapat hidup berdampingan selama sekian lama tanpa pernah sekali pun diusik oleh konflik.

Di Kota Surabaya, misalnya ketika isu tentang ancaman peledakan bom di sejumlah gereja sempat mencuat, salah satu fenomena yang menarik dicermati adalah sikap toleran dan upaya-upaya perlindungan yang diperlihatkan Banser NU dan berbagai organisasi sosial-keagamaan lain yang justru bersedia ikut menjaga ketentraman umat Kristen yang tengah beribadah tanpa harus dibayangkan dengan pandangan atau sikap yang tersekat-sekat atas dasar perbedaan agama yang dipeluk. Sejumlah informan dari pihak pemeluk agama Kristen yang diwawancarai, umumnya bukan saja menyatakan terima kasih dengan sikap simpatik yang

diperlihatkan sebagian umat Islam yang bersedia menjaga keamanan gereja dari kemungkinan serangan peledakan bom, tetapi mereka umumnya juga meyakini bahwa sikap saling melindungi dan toleran seperti itulah yang semestinya dikembangkan antar pemeluk agama yang berbeda di Provinsi Jawa Timur.

Di Surabaya, hal lain yang juga menjadi cermin dan strategis dikembangkan untuk menumbuhkan semangat multikulturalism adalah keberadaan Forum Lintas Agama. Aktivitas Forum Lintas Agama ini, kendati ruang gerak dan aktivitasnya tidak sepenuhnya mulus dan diterima oleh semua pihak, tetapi bagaimanapun juga harus diakui bahwa forum semacam ini sangat fungsional untuk menjembatani dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang berbeda agama untuk saling mengenal dan menjalin kontak yang lebih personal. Forum seperti ini, bahkan tidak hanya memungkinkan orang yang berbeda agama untuk saling kenal, tetapi juga antarorang yang berbeda etnis untuk dapat menjalin komunikasi satu dengan yang lain, sehingga cepat atau lambat akan dapat mengurangi timbulnya berbagai syakwasangka yang kontra-produktif bagi upaya membangun keserasian sosial di antara warga masyarakat Jawa Timur.

Salah satu fenomena yang menarik untuk disimak dalam konteks kehidupan multikulturalisme adalah ketika ada beberapa gereja yang ikut berperan menyediakan takjil untuk berbuka puasa bagi kaum muslim dan muslimat yang berpuasa. Aktivitas semacam ini, sepiantas mungkin tidak bermakna apa-apa, dan bahkan dapat menumbuhkan kecurigaan baru bahwa hal itu dilakukan gereja untuk menarik simpati dan merupakan bagian dari isu Kristenisasi. Tetapi, di mata warga masyarakat yang lain, aktivitas seperti itu sedikit-banyak membangun cara pandang dan menumbuhkan toleransi yang menggembarakan, khususnya antarpemeluk agama yang berbeda. Esensi masalahnya di sini bukan pada takjil yang disediakan gratis bagi umat muslim yang berpuasa, tetapi kesediaan orang yang berbeda agama untuk ikut menyumbang dan berbuat sesuatu kepada umat beragama yang lain, sungguh hal itu adalah hal yang menggembarakan dan positif.

Sikap tenggang rasa dan kesediaan untuk memahami perbedaan yang ada, tanpa harus diwarnai dengan syakwasangka, dalam banyak hal tampaknya terbukti merupakan kunci untuk membangun kehidupan multikulturalism di berbagai daerah Provinsi Jawa Timur. Selain yang terjadi di Surabaya, salah satu sikap multikulturalism yang juga menarik

untuk disimak adalah pada kasus seputar keberadaan salah satu klenteng yang ada di tepian pantai di pusat Kota Tuban. Sebagai tempat ibadah bagi orang yang memeluk agama Konghuchu, keberadaan klenteng ini ternyata relatif bisa hidup berdampingan dan diterima warga di sekitarnya yang beragama Islam (mayoritas) maupun Kristen (sebagian).

Di Kabupaten Tuban, hubungan keserasian yang berkembang di kalangan masyarakat setempat terjadi bukan hanya secara horizontal antarpemeluk agama dan etnis yang berbeda, tetapi juga secara vertikal. Di Tuban, sebuah wilayah yang relatif kecil, tetapi di sana antara umat Islam, Kristen dan Konghuchu umumnya telah sekian lama hidup berdampingan dengan rukun, tanpa pernah dinodai sedikitpun dengan pergesekan yang berbau SARA maupun ekonomi –kecuali konflik yang dipicu karena perbedaan ideologi dan kepentingan partai. Dalam radius hanya 1 kilometer, di Kabupaten Tuban dapat dijumpai adanya masjid, mushola, gereja dan klenteng yang relatif berdekatan, tanpa harus satu sama lain saling terganggu. Kunci dari hubungan keserasian yang terbangun di wilayah ini umumnya adalah pada sikap toleransi.

Perbedaan antarpemeluk agama dan antarkelas yang ada di wilayah ini, sebetulnya bukannya tidak ada. Di Kabupaten Tuban dan juga daerah lain, kebetulan mayoritas etnis Tionghoa yang ada adalah pemeluk agama Kristen dan Konghuchu, dan secara ekonomi status mereka rata-rata lebih mapan. Mereka umumnya adalah pemilik toko-toko besar dan tinggal di kawasan Pecinan. Tetapi, karena lingkungan komunitas setempat sudah saling kenal dan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menjalin kontak-kontak personal, maka yang namanya syakwasangka umumnya tidak banyak berkembang atau tidak memperoleh kesempatan untuk berkembang. Di Tuban, apa yang disebut *cross-cutting affiliation*, benar-benar berkembang, di mana antaretnis yang berbeda dan antar pemeluk agama yang berbeda, ternyata memiliki forum atau zone netral yang memungkinkan mereka tetap dapat saling berhubungan tanpa harus dibayang-bayangi dengan sikap egois yang sikap etnosentris yang kaku. Kegiatan olahraga bersama, seperti bermain bola basket atau bulu tangkis, atau mancing bersama, misalnya adalah aktivitas kebersamaan yang dapat menjadi jembatan untuk menetralsisir perbedaan dan kecurigaan yang tidak perlu.

Pada tingkat yang lebih mikro, studi ini juga menemukan bahwa peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam banyak kasus juga penting.

Dalam kasus konflik antara negara dan rakyat, kasus pertanahan, kasus industrialisasi, konflik perebutan sumber-sumber produksi dan sebagainya, peran tokoh lokal umumnya adalah mencoba menjadi jembatan kepentingan masyarakat dengan pihak yang berkuasa atau kekuatan komersial yang dinilai merugikan penduduk lokal. Pada batas-batas tertentu, peran tokoh ini terbukti efektif, tetapi beberapa informan mengakui bahwa tidak jarang mereka juga kewalahan ketika menghadapi tuntutan dan ketidakpuasan masyarakat yang benar-benar menggempal, dan aksi massa yang melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit. Ketika massa yang tidak puas pada sesuatu hal telah berkembang menjadi aksi kerumunan, misalnya, maka sering kali peran tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat menjadi sulit berkembang karena ulah atau perilaku massa yang terkadang lepas kendali.

Beberapa nara sumber yang diwawancarai dalam studi ini menyatakan bahwa selain soal teknis menghadapi aksi kerumunan, kendala lain yang acap kali menghambat peran tokoh masyarakat dan tokoh agama menghadapi aksi keresahan sosial adalah pada figur tokoh itu sendiri. Pascareformasi, menurut nara sumber tersebut, keberadaan tokoh yang benar-benar netral dan independen, dalam banyak hal makin sulit dicari karena mereka umumnya mulai terlibat dalam kehidupan politik, sehingga netralitasnya acap kali dipertanyakan masyarakat. Seorang ulama yang masuk ke partai politik tertentu, misalnya, tentu sulit diharapkan dapat menyelesaikan atau menjadi mediator ketika terjadi konflik politik.

Studi ini menemukan beberapa hal yang memengaruhi peran tokoh dalam penyelesaian dan penanganan keresahan sosial di masyarakat adalah: (1) netralitas atau independensi tokoh itu di mata masyarakat, (2) akses tokoh yang berangkutan ke jenjang politik yang lebih tinggi, karena hal itu akan menentukan sejauhmana tokoh yang bersangkutan mampu menjadi saluran bagi aspirasi sosial-politik masyarakat di sekitarnya, (3) kharisma dan wibawa tokoh itu di hadapan masyarakat, (4) kemampuan tokoh itu untuk merumuskan inti pokok persoalan, akar konflik dan aspirasi sosial-politik masyarakat yang ada, untuk kemudian dapat dicarikan jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Sebagai tokoh yang disegani dan dihormati masyarakat, posisi tokoh masyarakat dan ulama dalam mengantisipasi keresahan sosial di Provinsi Jawa Timur ibaratnya adalah sebagai pemadam kebakaran yang dengan taktis mampu mencegah kebakaran yang meluas sebelum api membesar.

Menangani dan menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur membesar, tentu selain dibutuhkan energi lebih besar, biasanya sering kali juga terlambat karena korban keburu berjatuh. Oleh sebab itu, dengan menempatkan posisi tokoh dan ulama sebagai bagian dari komponen *early warning system*, diharapkan upaya mengantisipasi keresahan sosial akan dapat lebih mungkin diwujudkan.

Di lingkungan masyarakat yang satu sama lain teralienasi dan tidak pernah menyapa, barangkali membangun kehidupan multikulturalisme bukan hal yang mudah. Tetap, studi ini memperlihatkan ketika di masyarakat banyak tumbuh zona atau forum yang memungkinkan mereka saling menyapa satu dengan yang lain, maka yang namanya syakwasangka dan potensi konflik akan dapat diredam pada tingkat yang sangat minimal. Pada batas-batas tertentu, studi ini menemukan bahwa di berbagai daerah di Jawa Timur, sikap toleran dan zona-zona netral inilah sebetulnya yang menjadi kunci dari perkembangan kehidupan multikulturalisme yang dinamis, namun fungsional dan efektif menjaga hubungan keserasian sosial antarwarga yang harmonis.

Prasyarat yang Dibutuhkan

Untuk lebih menjamin efektivitas pengembangan mekanisme deteksi dini, beberapa prasyarat yang diperlukan adalah pertama, butuh *sensitivity*, artinya setiap aparat atau warga masyarakat yang ada di ujung tombak, terutama yang bersentuhan langsung dengan komunitas lokal perlu peka atas berbagai isyarat/tanda keresahan sosial sesamar apapun sedini mungkin. Wujud-wujud keresahan sosial yang perlu diantisipasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut: (1) omongan, pergunjangan atau *labeling* yang merebak di masyarakat, (2) protes atau debat sengit individual, (3) sikap apatis yang makin meluas, (4) demonstrasi, dan (5) penyanderaan, penghalangan kegiatan serta perusakan/penganiayaan atas manusia atau harta-benda. Urutan keresahan ini sekaligus memperlihatkan tingkat-tingkat hierarkis keseriusan gangguan atau keresahan sosial yang timbul, dan sudah barang tentu membutuhkan level penanganan yang berbeda-beda.

Kedua, butuh koordinasi yang *multilevel*, baik menyangkut arus informasi keluhan maupun saling berbagi analisis dan pertukaran pendapat tentang solusi yang efektif untuk mengantisipasi keresahan sosial. Berharap masyarakat bersedia berperan aktif untuk menyampaikan hasil pengamatan mereka di lapangan, sudah barang tentu perlu didukung

kesediaan aparat birokrasi dan aparat keamanan untuk menghilangkan jarak sosial agar masyarakat tidak enggan menyampaikan keluhan.

Ketiga, butuh *exhaustiveness*. Artinya, dalam hal pencatatan data perlu diupayakan pengumpulan, pencatatan dan pemrosesan yang teliti cermat dan menyeluruh, baik tentang lokasi atau wilayah kejadian, waktu, pihak-pihak yang terlibat, sumber dan faktor penyebab keresahan, dampak yang ditimbulkan secara benar-benar mendalam. Prinsip ini hanya bisa dijalankan bila didukung oleh suatu sistem dokumentasi yang tertata rapi.

Keempat, butuh *fairness*. Artinya, secara jujur dan terbuka pemerintah harus berupaya sedapat mungkin untuk berpikir seadil-adilnya dan bertindak yang objektif dengan siapa pun, terutama terhadap mereka yang lemah, terabaikan dan marginal. Sejak awal perlu disadari bahwa aksi-aksi keresahan sosial pada dasarnya adalah sebuah "teriakan untuk meminta perhatian dan keadilan", sehingga yang semestinya dilakukan bukan pagi-pagi memperlakukan masyarakat yang meminta keadilan itu sebagai terdakwa, tetapi seyogianya memperlakukan mereka sebagai korban yang perlu mendapat simpati dan empati.

Simpulan

Atas dasar kajian lapangan, analisis berita-berita di media massa dan wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, beberapa temuan penting yang diperoleh dari studi ini adalah pertama, keresahan sosial yang timbul di masyarakat umumnya makin mencemaskan dan cenderung makin luas ketika tidak ada informasi yang jelas dari sumber yang memiliki otoritas, terlebih ketika ada pertentangan informasi dari sekian banyak sumber. Tidak adanya sumber yang dapat dipercaya, bukan saja akan menimbulkan desas-desus atau rumor, tetapi juga memperkeras perbedaan atau benturan kepentingan, sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik cenderung akan makin mengeras dan tidak saling percaya.

Kedua, adanya jarak sosial antara masyarakat dan aparat menyebabkan proses penyaluran keluhan masyarakat menjadi terhambat. Alih-alih warga masyarakat bersedia menjadi ujung tombak dalam mendeteksi dini terjadinya benih-benih keresahan sosial, sering terjadi justru masyarakat menarik diri dan menghindari berurusan dengan aparat karena takut terlibat dalam persoalan yang dapat merugikan posisi dirinya.

Ketiga, keresahan sosial yang sulit ditangani umumnya berkaitan dengan adanya perbedaan, keyakinan, ideologi dan keyakinan. Di sejumlah daerah, perbedaan yang terjadi di antara umat Islam sendiri, khususnya antara Syiah dan Sunni, misalnya dapat berpotensi menyulut terjadinya konflik yang terbuka. Di sisi lain, perbedaan sikap tentang pendirian tempat ibadah antara umat yang berbeda agama, dalam beberapa hal juga berpotensi menyulut keresahan sosial. Di Provinsi Jawa Timur, potensi konflik juga terjadi ketika massa partai satu dengan yang lain tengah bersaing dalam Pilkada, dan berbeda kepentingan dalam mengusung calonnya masing-masing. Pendek kata, perbedaan keyakinan, ideologi dan kepentingan sangat berpeluang untuk mendorong terjadinya keresahan sosial yang mencemaskan.

Keempat, konflik terbuka yang melibatkan massa atau kelompok dalam jumlah besar dan memiliki perbedaan identitas yang terwariskan dari waktu ke waktu cenderung sulit didamaikan/diakomodasikan.

Kelima, faktor yang mempercepat keresahan sosial menjadi konflik yang *manifest* umumnya adalah diskriminasi, inkonsistensi, ketidakadilan/kesewenang-wenangan. Di masyarakat mana pun sebetulnya senantiasa ada potensi-potensi konflik yang dilatarbelakangi karena adanya perbedaan keyakinan, ideologi, dan kepentingan. Potensi konflik yang sifatnya *latent* ini, akan dengan cepat menjadi *manifest* tatkala sikap pemerintah atau pihak ketiga dinilai berat sebelah, tidak adil, penerapan hukum yang inkonsisten, dan terlebih jika dirasakan ada perlakuan yang sewenang-wenang. Dalam berbagai kasus pertanahan, misalnya, tidak jarang radikalisme massa menjadi makin keras ketika pendekatan yang diterapkan ternyata bersifat represif dan dinilai sewenang-wenang.

Keenam, konflik yang sifatnya horizontal umumnya lebih sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat, dan bahkan ada kecenderungan terus berkepanjangan. Berbeda dengan konflik yang berbasis material, seperti demonstrasi buruh yang dilatarbelakangi keinginan untuk dinaikkan upahnya biasanya akan cepat terselesaikan jika tuntutan mereka terpenuhi. Tetapi, konflik yang disebabkan karena dendam kesumat yang terjadi antarkelompok atau golongan yang berbeda, niscaya tidak mudah terselesaikan hanya dengan jalan perundingan yang sifatnya formal.

Ketujuh, industrialisasi yang menafikan kepentingan masyarakat lokal cenderung berpotensi menyulut resistensi dan keresahan sosial. Di berbagai

daerah, ketika pembangunan industri ternyata hanya mementingkan eksploitasi sumber daya alam dan menambah pendapatan negara, tetapi tidak atau kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, maka jangan kaget jika dengan cepat akan menyulut resistensi dan keresahan sosial.

Kedelapan, keterlibatan dan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang dinilai masyarakat dalam posisi netral umumnya masih cukup signifikan untuk mencegah agar keresahan sosial tidak makin meluas.

Daftar Pustaka

- Afrizal (2007) Negara dan konflik agraria: studi kasus pada komunitas pusat perkebunan kelapa sawit berskala besar di Sumatera Barat. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 20(3): 89–107.
- Agustino, L (2004) Konflik dan Pembangunan politik. *Analisis CSIS* Vol. 33(3): 171–182.
- Fauzi, N (1997) Tanah dan pembangunan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Karnaji (2003) Konflik tanah perkebunan di Malang Selatan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 16(4): 29–51.
- Kuper, A & Kuper, J (2000) *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, N & Agustina, F (2003) *Gelombang Perlawanan Rakyat, Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: Insist.
- Siahaan, H (2002) Karakteristik dan faktor pemicu konflik di daerah Jawa Timur. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 15(1): 55–64.
- Susan, N (2009) *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susetiawan (2000) *Konflik Sosial, Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuwinanto, HP (2004) Konflik antaretnik di pedesaan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 17(3): 103–107.